



Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)

Ilham Budiman Panggabean*, Aprilinda Martinondang Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*ilhampgb1509@gmail.com

Abstract

Dynastic politics is a phenomenon that is currently being discussed by Indonesian people amid the 2024 presidential election campaign. This dynastic politics became a trending topic after the Indonesian president's son ran for vice president. The importance of finding a balance between political stability and justice is a major concern in addressing this issue. There are efforts from several elements of society and political activists to advocate for political reform that creates a more transparent and fair system. Therefore, the study of political dynasties that occurred in Indonesia needs to be studied more deeply. The article aims to describe and analyze the issue of political dynasties in Indonesia with a focus on the Islamic political context. This research is a qualitative literature review research with a phenomenological approach to research phenomena that are currently occurring. This research includes an analysis of the historical, structural, and ongoing social impacts of political dynasties within the framework of Islamic politics. The results of this research show that the issue of dynastic politics in Indonesia in 2023-2024 presents complex challenges, especially when viewed from an Islamic political perspective. By understanding these dynamics and seeking solutions that are in line with the principles of justice and democracy, Indonesia can steer itself toward a more inclusive and sustainable political system. In dealing with the issue of dynastic politics, aspects of accountability and transparency become a significant focus from an Islamic political perspective. These principles are considered crucial in protecting power and ensuring political action is by Islamic values. Through this research, it is hoped that it can open people's views to raise calls for political transformation and reform that reflects Islamic values and leads to more just, transparent, and participatory political governance.

Keywords: Politics; Dynasty; Islamic Perspective

Abstrak

Politik dinasti merupakan fenomena yang sedang menjadi perbincangan masyarakat Indonesia di tengah kampanye pemilu presiden tahun 2024 ini. Politik dinasti ini menjadi *trending topic* setelah putra presiden Indonesia mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Pentingnya menemukan keseimbangan antara stabilitas politik dan keadilan menjadi perhatian utama dalam mengatasi isu ini. Terdapat upaya dari sejumlah elemen masyarakat dan aktivis politik untuk mengadvokasi reformasi politik yang menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil. Oleh karenanya, kajian mengenai dinasti politik yang terjadi di Indonesia perlu ditelaah lebih dalam. Artikel bertujuan menggambarkan dan menganalisis isu dinasti politik di Indonesia dengan fokus pada konteks politik Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kajian pustaka dengan pendekatan fenomenologi untuk meneliti fenomena yang sedang terjadi saat ini. Penelitian ini mencakup analisis historis, struktural, dan dampak sosial berkelanjutan dinasti politik dalam kerangka politik Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Isu politik dinasti di Indonesia pada tahun 2023-2024 memberikan tantangan yang kompleks,

terutama ketika dilihat dari perspektif politik Islam. Dengan memahami dinamika ini dan berusaha mencari solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi, Indonesia dapat mengarahkan dirinya menuju sistem politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi isu politik dinasti, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi fokus yang signifikan dari perspektif politik Islam. Prinsip-prinsip ini dianggap krusial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tindakan politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat untuk membangkitkan panggilan untuk transformasi dan reformasi politik yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan mengarah pada tata kelola politik yang lebih adil, transparan, dan partisipatif.

Kata Kunci: Politik; Dinasti; Perspektif Islam

Pendahuluan

Dalam konteks politik Indonesia, isu politik dinasti telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2023-2024. Fenomena ini tidak hanya mencakup partai politik yang didominasi oleh keluarga tertentu, tetapi juga menyoroti peran politik Islam dalam dinamika tersebut. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi isu politik dinasti di Indonesia melalui lensa politik Islam, mengeksplorasi dampaknya terhadap sistem politik, masyarakat, dan dinamika keagamaan.

Mencermati beberapa penyebab terjadinya politik dinasti di Indonesia yang semakin marak ini dapat dinyatakan bahwa negara akan sulit menemukan pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik untuk memajukan tatanan pemerintahan dari berbagai tingkatan mulai pusat sampai daerah. Maraknya politik dinasti yang kental dengan unsur kerabat, selain itu partai politik hanya dijadikan alat kendaraan yang akan menyumbat fungsi ideal daripada partai politik itu sendiri, inilah kondisi yang tengah kita pandang saat ini. Perlu dipahami bahwa politik dinasti mencakup dominasi politik oleh satu keluarga atau sekumpulan keluarga yang saling terkait. Hal ini sering kali melibatkan pewarisan kekuasaan politik dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan dan peluang politik. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam sejumlah partai politik yang dikuasai oleh keluarga tertentu, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan politik dan keberlanjutan demokrasi (Alqani, 2021).

Fenomena lainnya, terlihat pada munculnya calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha yang tidak memiliki pengalaman organisasi dan latar belakang pendidikan yang memadai. Hal ini menimbulkan konsekuensi menutup ruang dan peluang masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk bisa mencalonkan diri untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi memperoleh kekuasaan.

Dalam perspektif politik Islam, isu politik dinasti dapat dilihat sebagai tantangan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diakui dalam ajaran Islam. Konsep kepemimpinan yang adil dan akuntabel menjadi nilai inti dalam ajaran politik Islam. Oleh karena itu, dominasi politik oleh dinasti dapat dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip tersebut, karena cenderung menciptakan konsentrasi kekuasaan dalam satu kelompok tanpa mempertimbangkan aspirasi luas masyarakat.

Selain itu, peran politik Islam dalam menghadapi isu politik dinasti tidak hanya terbatas pada kritik terhadap ketidakadilan politik, tetapi juga mencakup upaya membangun alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa kelompok dan organisasi Islam telah mengadvokasi sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis, di mana kekuasaan didistribusikan secara merata dan berdasarkan kapabilitas dan kualifikasi, bukan hanya hubungan keluarga.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh politik Islam dalam mengatasi isu politik dinasti juga muncul dari dinamika politik yang kompleks di Indonesia. Terdapat ketegangan antara aspirasi keadilan dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik. Beberapa orang berpendapat bahwa politik dinasti dapat memberikan stabilitas dalam jangka pendek, sementara yang lain menilai bahwa itu merugikan demokrasi dan keadilan jangka panjang (Salia & Wibowo, 2022).

Pentingnya menemukan keseimbangan antara stabilitas politik dan keadilan menjadi perhatian utama dalam mengatasi isu ini. Terdapat upaya dari sejumlah elemen masyarakat dan aktivis politik untuk mengadvokasi reformasi politik yang menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil. Pemikiran ini tidak hanya mencerminkan aspirasi politik Islam, tetapi juga mencoba mengajak partisipasi lintas agama untuk membangun fondasi politik yang lebih demokratis.

Selain itu, penting untuk menyadari bahwa politik dinasti bukanlah fenomena yang terbatas pada satu sektor politik atau satu kelompok agama. Ini adalah masalah sistemik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan sektor politik. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi isu politik dinasti harus melibatkan kerja sama lintas sektoral dan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya untuk membuka pandangan kita pada dinasti politik maka penelitian ini akan membahas tentang isu dinasti politik di Indonesia dengan fokus pada konteks politik Islam.

Metode

Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian kajian pustaka dengan pendekatan fenomenologi menjadi landasan yang relevan untuk mendalami isu politik dinasti di Indonesia dalam perspektif politik Islam. Analisis fenomenologi pada kajian pustaka ini memerlukan refleksi mendalam terhadap setiap literatur yang digunakan. Peneliti perlu mempertimbangkan makna-makna subjektif yang terkandung dalam teks dan bagaimana literatur-literatur tersebut merefleksikan realitas politik dinasti dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, dapat ditemukan pola-pola tematik atau konsep-konsep utama yang muncul dari literatur-literatur yang telah diulas. Tahapan dalam proses penelitian ini adalah menentukan kerangka konseptual, analisis dan refleksi literatur, pengkodean dan pengelompokan tematik untuk mengorganisir informasi dari literatur-literatur yang dianalisis hingga proses penulisan.

Hasil dan Pembahasan

Politik merupakan bidang yang kompleks dan melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam suatu masyarakat. Kajian teori politik membantu untuk memahami makna, dimensi, dan dinamika politik dengan menghadirkan berbagai konsep dan pandangan dari para ahli politik. Dalam kajian teori ini, kita akan membahas pengertian politik serta merinci beberapa pandangan dari tokoh-tokoh terkemuka. Dinasti politik di Indonesia telah menjadi topik yang kontroversial dan relevan dalam pembicaraan politik dan sosial. Fenomena ini melibatkan dominasi dan kekuasaan keluarga yang berlanjut dalam dunia politik, dan dalam konteks ini, kita akan melakukan studi komparatif dengan fokus pada perspektif Islam.

1. Sistem Politik Di Indonesia

Sistem politik di Indonesia adalah hasil dari perjalanan sejarah panjang, perubahan politik, dan dinamika sosial yang unik. Kajian teori sistem politik di Indonesia melibatkan pemahaman mendalam terhadap struktur, aktor, dan interaksi politik yang membentuk wajah politik negara ini.

Pertama-tama, sistem politik Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan, dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pilihan ini tercermin dalam Konstitusi 1945, yang telah mengalami beberapa perubahan sepanjang sejarah, mencerminkan dinamika politik dan aspirasi masyarakat (Badrun, 2021). Sebagai negara demokratis, Indonesia juga memiliki sistem multipartai. Partai politik memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan dan pemilihan umum. Partai-partai tersebut mewakili spektrum politik yang luas, dari ideologi nasionalis hingga agama. Dinamika multipartai memainkan peran kunci dalam pembentukan pemerintahan koalisi dan kompetisi politik yang sehat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki peran signifikan dalam sistem politik. DPR memegang kendali terhadap proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintah. Dalam konteks sistem presidensial, DPR menjadi saluran penting untuk pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.

Presiden, sebagai pemimpin eksekutif, memegang peranan kunci dalam sistem politik Indonesia. Kekuasaan presiden melibatkan pelaksanaan kebijakan, pemilihan pejabat kunci, dan pengambilan keputusan strategis. Keterkaitan antara presiden dan DPR menciptakan dinamika hubungan yang mempengaruhi proses kebijakan dan stabilitas politik (Rohim et al., 2023). Namun, untuk memahami sistem politik Indonesia, tidak cukup hanya mempertimbangkan struktur formal. Aspek kultural dan sejarah juga memainkan peran signifikan. Dengan beragam etnis, agama, dan budaya, Indonesia menghadapi tantangan integrasi yang unik. Pembentukan kebijakan harus mempertimbangkan keragaman ini untuk menciptakan inklusivitas dan stabilitas.

Peran agama dalam politik juga merupakan dimensi krusial. Meskipun Indonesia memiliki dasar negara yang menjunjung tinggi prinsip keberagaman, peran agama dapat mempengaruhi dinamika politik. Penanganan isu-isu keagamaan menjadi ujian sensitivitas dan kemampuan negara untuk memelihara kedamaian antar kelompok (Apriliyanti, 2022). Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi juga memberikan dampak besar terhadap sistem politik. Perubahan demografis, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi membentuk tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pemerintah. Respons pemerintah terhadap perubahan ini memainkan peran kunci dalam memastikan kelangsungan dan kestabilan sistem politik.

Kajian teori sistem politik di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang memahami kompleksitas faktor-faktor yang saling terkait. Dari struktur formal hingga aspek kultural dan dinamika sosial, pemahaman yang mendalam terhadap sistem politik ini penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan menjaga stabilitas politik yang berkelanjutan (Harmawansyah, 2019).

2. Politik Perspektif Islam

Politik dalam perspektif Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, merangkum prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kepemimpinan yang diatur oleh ajaran Islam. Artikel ini akan membahas beberapa dimensi politik dalam konteks pandangan Islam yang mencakup keadilan sosial, partisipasi politik, dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam Islam, keadilan sosial menjadi salah satu pilar utama politik. Prinsip-prinsip distribusi kekayaan, perlakuan adil terhadap seluruh warga negara, dan penanganan setiap individu dengan keadilan merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Konsep zakat (sumbangan amal) sebagai kewajiban sosial juga mencerminkan semangat keadilan dalam mendistribusikan kekayaan dan menolong yang membutuhkan. Partisipasi politik dalam Islam diimbangi dengan tanggung jawab moral. Masyarakat Muslim didorong untuk berpartisipasi aktif dalam urusan publik, baik melalui pemilihan

umum maupun advokasi untuk kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, partisipasi ini harus diikuti dengan tanggung jawab moral dan etika yang tinggi, agar tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tercapai (Syafri, 2020).

Pemerintahan dalam perspektif Islam diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun prinsip-prinsip ini dapat diinterpretasikan dengan beragam cara, intinya adalah memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Pemerintahan yang adil dan bermoral diyakini akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Konsep kepemimpinan (khilafah) dalam Islam menekankan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Pemimpin diharapkan untuk memimpin dengan adil, menghormati hak-hak individu, dan memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip konsultasi (syura) dalam pengambilan keputusan menjadi dasar untuk mencapai konsensus yang lebih luas dalam masyarakat.

Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap hak asasi manusia dalam konteks politik. Hak-hak tersebut termasuk kebebasan beragama, pendapat, dan keamanan pribadi. Meskipun kadang kala terjadi perbedaan interpretasi terkait hak-hak ini, dasar utamanya adalah menjunjung tinggi martabat manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip politik dalam Islam bersifat inklusif, menghormati pluralitas masyarakat. Masyarakat Muslim di seluruh dunia memiliki keberagaman budaya, etnis, dan tradisi politik. Oleh karena itu, konsep politik Islam dapat diadaptasi untuk mencerminkan konteks lokal, sambil tetap memegang prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Mujibbarahman et al., 2023).

Dalam menghadapi tantangan zaman modern, interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip politik Islam menjadi perdebatan yang terus berlanjut di dunia Muslim. Namun, kajian dan dialog terus diperlukan untuk memahami lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip politik Islam dapat diintegrasikan dengan baik dalam dinamika politik kontemporer. Keseluruhan, perspektif Islam dalam politik menawarkan fondasi etis dan moral yang kaya untuk membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan (Basya, 2021). Kajian teori politik Islam, atau sering disebut sebagai politik Islam, mencakup pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam memengaruhi dan membentuk institusi dan tata kelola politik. Pada kajian teori politik Islam, aspek-aspek seperti syariah, keadilan sosial, dan partisipasi politik umat Islam menjadi fokus utama.

a. Prinsip-prinsip Teori Politik Islam

1) Syariah

Pusat dari teori politik Islam adalah penerapan syariah, atau hukum Islam, dalam tatanan politik. Prinsip-prinsip syariah mencakup norma-norma moral, hukum pidana, ekonomi Islam, dan aturan-aturan kehidupan sehari-hari. Teori politik Islam berpendapat bahwa sistem politik harus mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang diakui dalam Islam.

2) Keadilan Sosial

Keadilan sosial menjadi pijakan penting dalam teori politik Islam. Konsep keadilan sosial dalam Islam mencakup distribusi sumber daya yang adil, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan penanggulangan kemiskinan. Pemikiran ini menekankan peran pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

3) Partisipasi Politik

Teori politik Islam mendukung partisipasi aktif umat Islam dalam proses politik. Demokrasi dan partisipasi publik dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan catatan bahwa keputusan politik harus sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ridwan, 2020).

b. Pandangan dan Pemikiran Ulama

1) Hassan al-Banna

Sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim), al-Banna mengembangkan konsep negara Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ia menekankan pentingnya persatuan umat Islam dan penerapan syariah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran sosial.

2) Sayyid Qutb

Qutb memperkenalkan konsep-konsep politik Islam yang lebih radikal. Ia menolak model pemerintahan manusia dan menganjurkan pengenalan sistem Islam yang menggantikan struktur politik dan sosial yang ada.

3) Abul A'la Maududi

Maududi adalah pemikir asal Pakistan yang menyumbangkan gagasan tentang negara Islam modern. Ia menekankan perlunya menyelaraskan kebijakan dan tindakan politik dengan prinsip-prinsip Islam, dengan demokrasi Islam sebagai cara untuk mencapai tujuan ini (Muhajir, 2023).

c. Tantangan dan Dinamika

1) Keseimbangan Antara Agama dan Politik

Salah satu tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara aspek agama dan kebutuhan politik sehari-hari. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks politik yang beragam seringkali menjadi perdebatan penting.

2) Pluralitas dan Toleransi

Dalam masyarakat yang beragam, konsep pluralisme dan toleransi menjadi krusial. Bagaimana politik Islam beradaptasi dengan masyarakat yang memiliki berbagai keyakinan dan praktik keagamaan menjadi tantangan utama (Muhajir, 2023).

3. Politik Dinasti dan Implikasinya

a. Politik Dinasti

Kajian teori politik dinasti mengulas fenomena politik di mana kekuasaan dan kepemimpinan diwariskan secara turun temurun dalam sebuah keluarga atau dinasti. Dinasti sering kali menjadi pusat kekuatan politik yang berkelanjutan, dan kajian teori ini mencakup aspek-aspek seperti dinamika kekuasaan, legitimasi, dan dampaknya terhadap stabilitas politik.

Pertama-tama, dinasti menciptakan sistem politik di mana kepemimpinan dan kekuasaan diwariskan secara keturunan. Ini dapat terjadi melalui pewarisan gelar, monarki, atau bentuk kepemimpinan keturunan lainnya. Dinasti sering kali membangun tradisi dan norma yang memperkuat legitimasi keluarga tersebut untuk memerintah.

Dinamika kekuasaan dalam dinasti sering kali dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk dinamika keluarga, seperti hubungan antar anggota keluarga dan pewarisan gelar. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan hubungan dengan pihak-pihak eksternal, seperti sekutu politik atau oposisi, yang dapat mempengaruhi stabilitas dinasti (Agus Dedi, 2022).

Tantangan terbesar dalam sistem politik dinasti adalah risiko monotonisasi kebijakan. Ketika kekuasaan diwariskan secara turun temurun, ada kemungkinan kebijakan dan strategi pemerintahan menjadi terpaku pada norma dan tradisi tertentu, tanpa memberikan ruang untuk inovasi atau adaptasi terhadap perubahan zaman.

Selain itu, adanya dinasti dapat menciptakan kelas politik yang tertutup, mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan. Ini dapat menghasilkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menjadi sumber ketegangan sosial. Oleh karena itu, studi teori politik dinasti juga mempertimbangkan dampak ketidaksetaraan dalam sistem politik.

Dalam menyusun pemahaman tentang dinasti politik di Indonesia, perlu dipahami konteks sejarahnya. Beberapa contoh terkemuka termasuk keluarga Soekarno yang telah memiliki pengaruh politik yang signifikan. Studi kasus ini membantu merinci dinamika politik dan bagaimana dinasti politik menjadi embedded dalam struktur kekuasaan negara. Dalam menghadapi perkembangan zaman, beberapa dinasti mungkin mampu mengadaptasi dan memodernisasi sistem politik mereka, sementara yang lain mungkin mengalami kemunduran atau akhirnya digantikan oleh sistem politik yang lebih demokratis. Dinamika politik dinasti seringkali merupakan cerminan dari ketangguhan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman (Sukmariningsih, 2023).

Indonesia tidak memiliki tradisi politik dinasti presiden sebagaimana terjadi di beberapa negara lain. Sebaliknya, sistem politik Indonesia lebih cenderung kepada pemilihan presiden melalui mekanisme demokratis. Namun, ada beberapa keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam politik, di mana anggota keluarga mereka menjabat dalam posisi politik yang berbeda-beda.

1) Keluarga Soekarno

Presiden pertama Indonesia, Soekarno, adalah figur sentral dalam sejarah politik Indonesia. Meskipun Soekarno memiliki keturunan yang terlibat dalam politik setelahnya, Indonesia tidak mengalami dominasi penuh satu dinasti. Megawati Soekarnoputri, putri Soekarno, menjadi presiden Indonesia pada tahun 2001-2004. Namun, perlu dicatat bahwa keberlanjutan politik dalam keluarga Soekarno tidak menciptakan dinasti presiden seperti pada beberapa negara lain.

2) Keluarga Yudhoyono

Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memegang jabatan pada tahun 2004-2014. Anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, mencoba terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada pemilihan gubernur tahun 2017, namun tidak berhasil memenangkan pemilihan.

3) Keluarga Widodo

Presiden ketujuh dan kedelapan Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memegang jabatan sejak 2014. Meskipun keluarga Jokowi terlibat dalam politik lokal, konsep dinasti presiden tidak sepenuhnya mencakup keterlibatan keluarga dalam kepemimpinan nasional.

Perlu dicatat bahwa Indonesia menerapkan batasan dalam Konstitusi terkait periode jabatan presiden yang membatasi satu orang untuk menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Hal ini mengurangi kemungkinan terbentuknya dinasti presiden yang berlanjut secara langsung. Walaupun sejarah politik Indonesia tidak mencatat adanya dinasti presiden, namun dinamika politik dan peran keluarga dalam politik lokal tetap berlangsung. Politik keluarga, di mana beberapa anggota keluarga terlibat dalam posisi politik yang berbeda, masih dapat ditemui dalam beberapa kasus, tetapi itu lebih bersifat regional daripada nasional.

b. Dampak Politik Dinasti

Politik dinasti, yang melibatkan dominasi kekuasaan oleh keluarga atau keturunan dalam suatu jabatan politik, memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek politik, sosial, dan ekonomi. Kajian teori terkait dampak politik dinasti menjadi penting untuk memahami implikasi jangka panjang dari fenomena ini.

1) Kontrol Kekuasaan dan Otoritarianisme

Dalam sistem politik yang didominasi oleh keluarga, otoritarianisme cenderung berkembang karena kendali yang kuat dipegang oleh kelompok tertentu. Teori ini menyebutkan bahwa keberlanjutan kekuasaan di tangan keluarga dapat mengancam demokrasi dan partisipasi masyarakat.

- 2) Pengaruh Politik dan Nepotisme
Teori ini menyoroti kemungkinan penunjukan anggota keluarga ke posisi kunci dalam pemerintahan atau birokrasi, yang dapat mengabaikan prinsip meritokrasi. Hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam distribusi peluang politik.
- 3) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
Keluarga politik yang mendominasi cenderung fokus pada kepentingan mereka sendiri, meninggalkan potensi kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan peluang.
- 4) Ketidakstabilan Politik
Jika terjadi pertikaian internal dalam keluarga atau ketidaksetujuan antara kelompok politik yang bersaing, dapat mengakibatkan gangguan politik yang merugikan stabilitas dan perkembangan nasional.
- 5) Perubahan Kebijakan yang Terbatas
Pemimpin yang berasal dari keluarga politik cenderung mempertahankan kebijakan yang telah ada atau mengubahnya secara terbatas, mengakibatkan stagnasi dalam inovasi kebijakan.
- 6) Menurunkan Kepercayaan Publik
Jika masyarakat merasa bahwa kekuasaan secara terus-menerus dipegang oleh satu keluarga, hal ini dapat merugikan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi politik.
- 7) Tantangan bagi Pemimpin Baru dan Pembaruan
Teori ini menunjukkan bahwa adanya keluarga politik yang sudah mapan dapat menjadi hambatan bagi individu atau kelompok baru yang ingin memasuki dunia politik dan membawa perubahan.
- 8) Potensi Pertentangan dan Fragmentasi
Persaingan antar anggota keluarga atau kelompok dalam keluarga dapat memicu ketegangan internal yang dapat merugikan stabilitas politik secara keseluruhan (Khairi, 2022).

4. Politik Dinasti di Indonesia Tahun 2023-2024 Perspektif Politik Islam Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah dan Kepemimpinan

Isu politik dinasti di Indonesia kurun waktu 2023-2024 dalam perspektif politik Islam mengundang refleksi mendalam terkait dengan prinsip-prinsip syariah, keadilan sosial, partisipasi umat Islam, dan pengelolaan kekuasaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, kita dapat mengeksplorasi beberapa dimensi kritis yang muncul dari perspektif politik Islam terhadap isu politik dinasti di Indonesia (Gunanto, 2020). Dalam pandangan politik Islam, kepemimpinan seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, akuntabilitas, dan pemenuhan kemaslahatan umum. Isu politik dinasti memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pemimpin dinasti menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam tindakan dan kebijakan mereka. Dalam perspektif politik Islam, isu politik dinasti di Indonesia menjadi pemandangan yang kompleks dan menantang, menimbulkan pertanyaan fundamental tentang implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola politik. Kesimpulan terhadap isu ini melibatkan refleksi mendalam terhadap dampaknya terhadap prinsip-prinsip syariah, keadilan sosial, partisipasi politik umat Islam, dan tata kelola kekuasaan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Pertama-tama, isu politik dinasti di Indonesia menciptakan perdebatan terkait dengan sejauh mana kepemimpinan dinasti dapat mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif politik Islam, kepemimpinan seharusnya didasarkan pada etika dan

moral Islam, memastikan keadilan, akuntabilitas, dan pelayanan masyarakat yang sejalan dengan ajaran agama. Kesimpulan ini memunculkan kebutuhan untuk menilai apakah pemimpin dinasti mampu memadukan nilai-nilai syariah dengan praksis politik mereka (Tanjung & Faizal, 2021). Dalam konteks ini, pandangan politik Islam menekankan demokrasi yang inklusif dan partisipasi aktif umat Islam. Isu politik dinasti dapat merintangi partisipasi politik umat Islam, baik dalam konteks partai politik maupun dalam proses pembentukan kebijakan. Kesimpulan ini membawa implikasi penting tentang perlunya mekanisme politik yang memastikan keadilan dan kesetaraan akses terhadap kekuasaan, sehingga partisipasi politik umat Islam dapat dihargai dan diakui.

Prinsip keadilan sosial, yang menjadi pilar penting dalam pandangan politik Islam, juga terlibat dalam kesimpulan ini. Politik dinasti dapat memunculkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, memaksa pertanyaan tentang sejauh mana sistem politik tersebut dapat menciptakan keseimbangan yang adil dan merata dalam manfaat sosial dan ekonomi. Kesimpulan ini merangsang perdebatan tentang dampak politik dinasti terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketidaksetaraan yang mungkin muncul. Dalam menghadapi isu politik dinasti, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi fokus yang signifikan dari perspektif politik Islam. Prinsip-prinsip ini dianggap krusial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tindakan politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kesimpulan terhadap isu ini menciptakan panggilan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, sehingga kebijakan dan tindakan politik dinasti dapat diuji sejauh mana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks politik Islam, keseimbangan antara tradisi dan reformasi menjadi pertimbangan kunci. Kesimpulan ini menciptakan dorongan untuk mencari jalan tengah yang memungkinkan pelestarian nilai-nilai tradisional sambil mendorong reformasi yang mendukung keadilan sosial dan partisipasi politik yang lebih besar. Dalam hal ini, pandangan politik Islam menciptakan ruang untuk refleksi tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai kemajuan dan reformasi tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai kultural (Pratama & Fitriasia, 2023). Selanjutnya, peran lembaga-lembaga keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, dalam membentuk pandangan politik Islam terhadap politik dinasti menjadi penting. Kesimpulan ini menunjukkan perlunya kerjasama antara lembaga keagamaan dan masyarakat untuk membangun pemahaman bersama tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana mereka dapat tercermin dalam tindakan politik dinasti.

Pandangan Islam terhadap politik dinasti mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Meskipun tidak ada pandangan tunggal yang universal di seluruh dunia Muslim, beberapa konsep utama dapat diidentifikasi dalam pemahaman Islam terhadap politik dinasti.

a. Kepemimpinan Berdasarkan Kualifikasi

Pemikiran Islam menekankan bahwa kepemimpinan seharusnya didasarkan pada kualifikasi, keadilan, dan kemampuan, bukan sekadar hubungan keluarga atau dinasti. Prinsip ini dalam ajaran Islam yang menekankan memilih pemimpin yang adil dan mampu memimpin dengan baik, tidak memandang garis keturunan.

b. Syariah dan Keadilan Sosial

Islam memberikan penekanan pada penerapan syariah sebagai panduan untuk tata kelola politik. Isu politik dinasti di Indonesia menciptakan kompleksitas dalam dinamika politik, terutama ketika dilihat dari perspektif politik Islam. Dalam pembahasan ini, dilihat bagaimana politik dinasti di Indonesia memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam kerangka politik Islam, mencakup dampaknya terhadap demokrasi, prinsip-prinsip syariah, dan partisipasi politik umat Islam (Maslamah & Yusdani, 2022).

Politik dinasti di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, dan hal ini tampaknya berkembang dalam beberapa periode, termasuk era kolonial dan era Orde Baru. Beberapa keluarga politik mempertahankan kekuasaan dan memainkan peran dominan dalam politik Indonesia. Perkembangan ini menciptakan tatanan politik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang adil (Dairani, 2022).

Dalam pandangan politik Islam, demokrasi diharapkan untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan, partisipasi umat Islam, dan keberlanjutan prinsip-prinsip syariah. Namun, isu politik dinasti dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi di Indonesia mencapai tujuan tersebut. Kritik terhadap politik dinasti sering kali muncul karena menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan politik, yang dapat merugikan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan inklusif. Dari perspektif politik Islam, prinsip-prinsip syariah seharusnya menjadi dasar bagi tata kelola politik. Pertanyaan muncul tentang sejauh mana praktik politik dinasti sesuai dengan nilai-nilai syariah. Syariah menekankan keadilan, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, politik dinasti yang diwariskan harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Partisipasi politik umat Islam sering menjadi perhatian dalam konteks politik dinasti. Dalam hal ini, representasi politik Islam dapat terbatas jika keluarga politik yang mendominasi tidak mencerminkan atau mewakili keberagaman masyarakat Indonesia secara adil. Partai-partai politik atau figur-figur politik Islam dapat mengalami kendala untuk memperoleh akses yang setara terhadap kekuasaan politik.

Ajaran Islam menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan. Politik dinasti sering dikritik karena dapat menciptakan lingkungan di mana akuntabilitas lemah dan kebijakan politik lebih terfokus pada kepentingan keluarga politik daripada kepentingan umum. Dalam perspektif politik Islam, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Politik dinasti di Indonesia sering kali menciptakan dilema antara mempertahankan tradisi dan mendorong reformasi. Sementara beberapa keluarga politik memiliki dukungan kuat dari masyarakat karena dianggap sebagai penjaga tradisi atau kestabilan, ada juga tuntutan untuk reformasi politik yang lebih demokratis dan inklusif. Lembaga-lembaga keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memiliki peran penting dalam membentuk pandangan politik Islam terhadap isu politik dinasti. Mereka dapat memainkan peran dalam memberikan arahan etika dan moral kepada umat Islam serta menyuarakan keprihatinan terhadap praktik politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara keseluruhan, isu politik dinasti di Indonesia, ketika dianalisis dari perspektif politik Islam, menghadirkan serangkaian pertanyaan dan tantangan yang memerlukan refleksi mendalam dan aksi konstruktif. Kesimpulan ini membangkitkan panggilan untuk transformasi dan reformasi politik yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan mengarah pada tata kelola politik yang lebih adil, transparan, dan partisipatif.

5. Isu Dinasti Politik di Indonesia dalam Pemilu Tahun 2023-2024

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu mekanisme untuk memilih para pemimpin dan sekaligus merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga akan terbentuk perwakilan pemerintahan yang memiliki legalitas formal sesuai dengan konstitusi. Pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi, yaitu untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pergantian pemimpin melalui mekanisme pemilihan dimungkinkan terjadinya persaingan yang ketat bagi calon-calon yang berkeinginan menduduki jabatan politis atau struktural dalam pemerintahan. Para calon pasti akan menyusun strategi untuk mencari dukungan dari masyarakat yang mempunyai hak suara. Dalam implementasinya terdapat satu alternatif strategi yang sering dilakukan oleh para calon untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan melalui strategi yang mengabaikan etika berpolitik, yaitu dengan cara memberi uang kepada masyarakat agar memilih dirinya.

Dinamika Politik Dinasti yang berorientasi pada kekuasaan yang bersifat turun temurun dan kekerabatan. Idealnya fenomena seperti itu harus dihindari dan tidak dilakukan karena semakin umbuhnya praktik politik dinasti yang mengedepankan unsur kekeluargaan atau kekerabatan, maka proses rekrutmen dan pergantian kepemimpinan di tubuh partai politik tidak berjalan atau stagnan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi partai pembentukan politik tanah air.

Mencermati beberapa penyebab terjadinya politik dinasti di Indonesia yang semakin marak ini dapat dinyatakan bahwa negara akan sulit menemukan pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik untuk memajukan tatanan pemerintahan dari berbagai tingkatan mulai pusat sampai daerah. Sistem politik dinasti, sistem pengkaderan di dalam tubuh partai politik tidak berkembang dengan baik. Kader-kader yang ada di dalam partai politik tidak mendapat kesempatan atau peluang untuk turut serta berkompetisi menjadi pemimpin bangsa.

Maraknya politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Partai politik hanya dijadikan alat kendaraan politik yang pada akan menyumbat fungsi ideal partai karena partai politik hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. Rekrutmen kader partai politik tidak berjalan ideal karena yang dilihat hanya dari aspek popularitas kekayaan calon untuk meraih kemenangan.

Konteks lainnya ada juga ditunjukkan dengan sisi lain muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha yang tidak memiliki pengalaman organisasi dan latar belakang pendidikan yang memadai. Konsekuensi menutup ruang dan peluang masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk bisa mencalonkan diri untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi memperoleh kekuasaan. Pusaran kekuasaan jangan sampai terjadi berada di lingkungan elite politik yang mengedepankan kekerabatan atau keluarga. Berpotensi memunculkan terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih jangan sampai hal tersebut terjadi karena akan semakin jauh dari cita-cita bersama dan tidak dapat mewujudkan sistem demokrasi yang sehat.

Keberlangsungan Politik Dinasti suatu bertanda bahwa pendidikan politik di tanah air tidak berjalan dengan baik. Setiap warga masyarakat dalam menduduki jabatan itu terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat dan kriteria, sehingga peluang yang terbuka ini memberikan hak yang sama kepada warga negara. Jabatan itu dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang yang memiliki kekeluargaan, kekerabatan ataupun kedekatan secara emosional. Regulasi yang mengatur pembatasan periodisasi agar politik dinasti tidak bertumbuh dengan cepat karena merusak tatanan sistem demokrasi.

Geliat nepotisme dan politik dinasti kembali tampak dalam pemilihan kepala daerah, ada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wali kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution yang menjadi wali kota Medan, Sumatera Utara. Ada putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang menjadi wali kota Tangerang Selatan. Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Saraswati Djojohadikusumo, yang menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan. Selain itu

juga ada Hanindito Himawan Pramono, putra Pramono Anung yang menjadi kepala daerah di Kediri (Mashari & Retno Mawarini Sukmariningsih, 2023). Politik dinasti atau politik kekerabatan memang bukan hal yang dilarang karena dalam demokrasi setiap orang memiliki kesetaraan, namun memiliki dampak yang mesti dicegah. Hal tersebut tentu saja menyebabkan politik dinasti adalah hal yang kontrversial dan problematik dalam demokrasi meski diakui oleh konstitusi.

6. Peran Agama Islam Dalam Menghadapi Dinasti Politik

Peran agama Islam dalam menanggapi dinasti politik di Indonesia merupakan aspek yang kompleks dan bernuansa multi-dimensi. Untuk memahami dinamika ini, perlu dilakukan kajian teori yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip agama Islam, sejarah politik Indonesia, serta dinamika sosial masyarakat. Agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan bagi tata kelola pemerintahan. Konsep-konsep seperti keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan menjadi pedoman dalam agama Islam, menciptakan harapan masyarakat terhadap pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks dinasti politik di Indonesia, teori ini dapat dijabarkan melalui konsep kepemimpinan adil yang diakar pada prinsip-prinsip syariah.

Pertama, syariah Islam menekankan pada prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Konsep keadilan ini menjadi dasar bagi umat Islam dalam menilai dan menanggapi dinasti politik. Jika sebuah dinasti dianggap tidak menjalankan prinsip keadilan, maka masyarakat dapat merespon secara kritis berdasarkan ajaran agama Islam.

Kedua, dalam konteks kepemimpinan adil, agama Islam menekankan perlunya pemimpin yang amanah dan tulus dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dinasti politik yang dipimpin oleh pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai moral agama Islam diyakini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebaliknya, jika pemimpin dinasti terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, agama Islam memberikan landasan kritik yang kuat.

Selain itu, teori ini juga melibatkan analisis sejarah politik Indonesia. Sejak masa awal penyebaran Islam di Indonesia, agama ini telah menjadi faktor penting dalam pembentukan identitas dan budaya masyarakat. Dalam beberapa periode sejarah, agama Islam telah menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik, bahkan membentuk dinasti-dinasti politik tertentu. Dalam menyikapi dinasti politik, masyarakat Indonesia seringkali menggunakan landasan ajaran agama Islam sebagai kriteria penilaian. Hal ini tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat Muslim dalam pemilihan umum, di mana mereka cenderung mendukung pemimpin yang dianggap memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam.

Namun, peran agama Islam dalam menanggapi dinasti politik tidak selalu bersifat kritis. Ada juga situasi di mana agama Islam dijadikan alat legitimasi oleh pemimpin politik untuk mengokohkan kekuasaannya. Oleh karena itu, kajian teori perlu memperhatikan dinamika kompleks ini untuk mendapatkan pemahaman yang holistik.

Secara keseluruhan, kajian teori peran agama Islam dalam menanggapi dinasti politik di Indonesia menyoroti hubungan yang erat antara nilai-nilai agama, sejarah politik, dan dinamika sosial. Dengan memahami konsep kepemimpinan adil dalam perspektif agama Islam, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana masyarakat Indonesia merespons dan membentuk dinasti politik dengan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan (Hafidh, 2022).

7. Sikap Masyarakat Terhadap Politik Dinasti di Indonesia Tahun 2023-2024

Kajian teori mengenai sikap masyarakat terhadap politik dinasti di Indonesia melibatkan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik yang didominasi oleh keluarga atau dinasti politik. Beberapa teori yang relevan untuk dikaji melibatkan psikologi politik, sosiologi politik, dan teori partisipasi politik.

a. Psikologi Politik

Sikap masyarakat terhadap politik dinasti bisa dipahami melalui lensa psikologi politik, dengan memerhatikan faktor-faktor seperti identifikasi politik, kepercayaan, dan pengalaman pribadi. Misalnya, apakah masyarakat merasa terwakili atau terpinggirkan oleh dinasti politik dapat memengaruhi sikap mereka.

b. Sosiologi Politik

Dalam perspektif sosiologi politik, penting untuk menganalisis struktur sosial dan bagaimana dinasti politik dapat menjadi bagian integral dari sistem politik. Faktor-faktor seperti status sosial, kekuatan ekonomi, dan hubungan kekerabatan dapat membentuk sikap masyarakat terhadap politik dinasti.

c. Teori Partisipasi Politik

Masyarakat yang merasa partisipasinya signifikan dalam politik dinasti dapat memiliki sikap yang berbeda dengan yang merasa terpinggirkan. Teori partisipasi politik membahas tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan bagaimana dinasti politik mungkin mempengaruhi motivasi partisipasi atau ketidakpartisipasian.

d. Faktor Ekonomi

Analisis ekonomi politik juga penting, karena dinasti politik seringkali terkait erat dengan kontrol sumber daya ekonomi. Melihat dampak ekonomi dinasti politik terhadap kesejahteraan masyarakat dapat membantu menjelaskan sikap mereka terhadap fenomena ini.

e. Pengaruh Media Massa

Media massa memainkan peran besar dalam membentuk opini publik. Kajian seharusnya melibatkan analisis terhadap bagaimana media meliput dan mempresentasikan politik dinasti serta bagaimana itu memengaruhi persepsi masyarakat.

f. Reformasi Politik

Sikap masyarakat terhadap dinasti politik juga dapat dipengaruhi oleh sejarah politik Indonesia, terutama periode reformasi. Pemahaman terhadap perubahan politik dan upaya menuju sistem yang lebih demokratis dapat membantu menjelaskan dinamika sikap masyarakat.

Dengan memadukan pendekatan-pendekatan tersebut, kita dapat membentuk pemahaman yang lebih holistik tentang sikap masyarakat terhadap politik dinasti di Indonesia. Faktor-faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan politis harus diperhitungkan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

Kesimpulan

Dalam menghadapi isu politik dinasti, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi fokus yang signifikan dari perspektif politik Islam. Prinsip-prinsip ini dianggap krusial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tindakan politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks politik Islam, keseimbangan antara tradisi dan reformasi menjadi pertimbangan kunci. Kesimpulan ini menciptakan dorongan untuk mencari jalan tengah yang memungkinkan pelestarian nilai-nilai tradisional sambil mendorong reformasi yang mendukung keadilan sosial dan partisipasi politik yang lebih besar. Secara keseluruhan, isu politik dinasti di Indonesia pada tahun 2023-2024, ketika

dianalisis dari perspektif politik Islam, menghadirkan serangkaian pertanyaan dan tantangan yang memerlukan refleksi mendalam dan aksi konstruktif. Kesimpulan ini membangkitkan panggilan untuk transformasi dan reformasi politik yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan mengarah pada tata kelola politik yang lebih adil, transparan, dan partisipatif.

Daftar Pustaka

- Agus Dedi. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 92–101.
- Alqani, M. N. dan W. (2021). *Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Aceh: Syiah Kuala University Pres.
- Apriliyanti, A. K. (2022). Legal Standing Warga Negara Indonesia Dalam Pembubaran Partai Politik Perspektif Ham Islam. *JIL : Journal of Indonesian Law*, 3(1), 82–104.
- Badrun, U. (2021). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Basya, M. H. (2021). *Islam Dan Negara : Studi Pemikiran Al-Mawardi*. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* (Vol. 2021).
- Dairani, D. (2022). Upaya Konstitusional Dalam Memutus Mata Rantai Dinasti Politik Pada Pemilu Tahun 2024. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 2(2), 199–210.
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191.
- Hafidh, M. R. N. (2022). Peran politik pemuka agama Islam dalam Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020. *E-Civics*, 11(01), 65–80.
- Harmawansyah, M. F. (2019). *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: Scopindo.
- Khairi, H. (2022). Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 35.
- Mashari, & Retno Mawarini Sukmariningsih. (2023). Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(4), 53–69.
- Maslamah, A., & Yusdani. (2022). Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(2), 97–110.
- Muhajir. (2023). Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia Imam Al-Mawardi ' s Islamic Political Thought and Its Relevance in Indonesia. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, X(I), 83–98.
- Mujibarrahman, Agung Muhammad. (2023). *Proses Terbentuknya Asas Praduga Terhadap Politik Dinasti Suatu Negara*. 6160(2), 37–44.
- Pratama, G. N., & Fitriasia, A. (2023). *Fenomena Dinasti Politik dari Perspektif Aksiologis*. 7, 30755–30762.
- Ridwan. (2020). *Fiqih Politik*. Jakarta: AMZAH.
- Rohim, M., Rahmawati, L., Raihan, A., & Rizki, S. (2023). Demokrasi Pancasila: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 664.
- Salia, F. N., & Wibowo, P. (2022). *Ada Apa Dengan Faktor Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Eks Karesidenan Surakarta? Badan Pemeriksa Keuangan , Jakarta , Indonesia Politeknik Keuangan Negara STAN , Tangerang Selatan , Indonesia Fatah Nur Salia : A*. 8(1), 63–88.

- Sukmariningsih, R. M. (2023). *Batasan Politik Dinasti Perspektif Moral Hukum*. 21(2), 1–16.
- Syafril, R. (2020). Politik Dinasti dalam Pandangan Islam. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(1), 125.
- Tanjung, M. A., & Faizal, F. (2021). Potret Keadilan Dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 144.